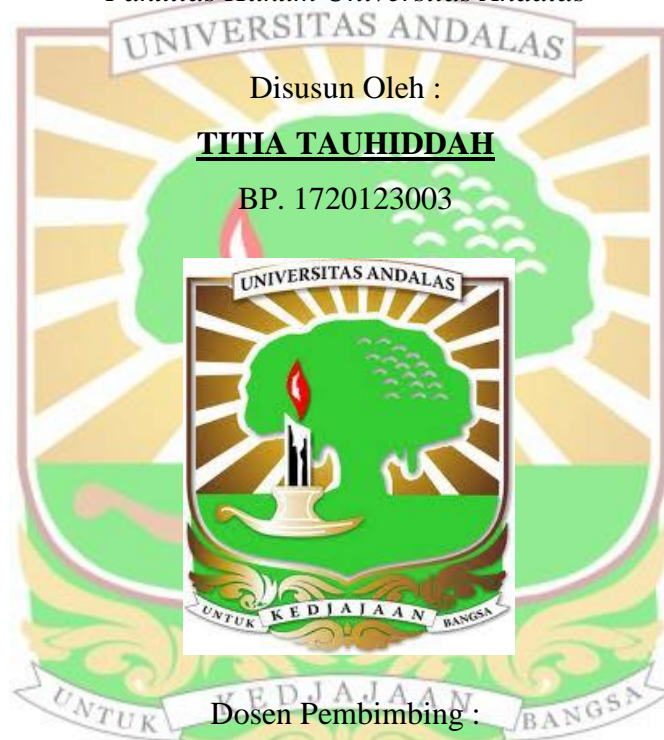


**KEWENANGAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN LEMBAGA  
PEMBIAYAAN ANTARA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA  
KONSUMEN (BPSK) DENGAN LEMBAGA ALTERNATIF  
PENYELESAIAN SENGKETA (LAPS)**

**TESIS**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan*

*Fakultas Hukum Universitas Andalas*



Disusun Oleh :

**TITIA TAUHIDDAH**

BP. 1720123003

Dosen Pembimbing :

Dr. BUSYRA AZHERI, SH., MH.

Dr. YUSSY A. MANNAS, SH., MH.

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2019**

**KEWENANGAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN LEMBAGA  
PEMBIAYAAN ANTARA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA  
KONSUMEN (BPSK) DENGAN LEMBAGA ALTERNATIF  
PENYELESAIAN SENGKETA (LAPS)**

**Titia Tauhiddah, BP 1720123003, Program Magister Kenotariatan, Fakultas  
Hukum Universitas Andalas. 171 Halaman. Tahun 2019  
Pembimbing Dr. H. Busyra Azheri, S.H., M.H dan Dr. Yussy A. Mannas,  
S.H., M.H**

**ABSTRAK**

Salah satu upaya pemerintah untuk menyelesaikan sengketa konsumen melalui jalur non litigasi adalah melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Selain itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengamanatkan pendirian lembaga guna menyelesaikan sengketa konsumen sektor jasa keuangan yaitu Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen (LAPS). Penelitian dilakukan secara normatif. Kajian ditekankan pada kewenangan penyelesaian sengketa konsumen lembaga pembiayaan antara BPSK dengan LAPS dan prosedur penyelesaian sengketa melalui BPSK dan LAPS-BMPPVI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPSK berwenang menyelesaikan sengketa konsumen akhir, kewenangan yang dijalankan oleh BPSK diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Hanya saja mengenai putusan yang dikeluarkan BPSK terkait kasus lembaga pembiayaan khususnya yang mengandung unsur perjanjian kredit sering kali dibatalkan oleh Mahkamah Agung dikarenakan BPSK dinilai tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa yang terdapat unsur perjanjian. Kewenangan LAPS diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. LAPS membagi lembaga penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan dalam 6 lembaga, yang pendiriannya dilakukan OJK dengan bekerjasama dengan Lembaga Jasa Keuangan. LAPS yang berwenang menyelesaikan sengketa konsumen lembaga pembiayaan adalah BMPPVI (badan mediasi pergadaian, pembiayaan, dan modal ventura Indonesia). BPSK menyelesaikan sengketa melalui cara Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase, sedangkan LAPS-BMPPVI menyelesaikan sengketa melalui cara Mediasi, Ajudikasi dan Arbitrase.

***Kata kunci*** : BPSK; BMPPVI; LAPS; Lembaga Pembiayaan; Sengketa Konsumen;

**AUTHORITY OF THE CONSUMER DISPUTE RESOLUTION  
FINANCING INSTITUTIONS BETWEEN THE AGENCY OF  
CONSUMER DISPUTE RESOLUTION (BPSK) AND THE  
ALTERNATIVE AGENCY OF DISPUTE RESOLUTION (LAPS)**

**Titia Tauhiddah, 1720123003, Notary Magister Program, Faculty of Law,  
Andalas University. 171 Pages. 2019**

**Advisor: Dr. H. Busyra Azheri, S.H., M.H dan Dr. Yussy A. Mannas, S.H.,  
M.H**

**ABSTRACT**

*One of the governments attempted to resolve consumer disputes through non-litigation is by The Agency of Consumer Dispute Resolution (BPSK). Besides, the Financial Service Authority (OJK) established The Alternative Agency of Dispute Resolution (LAPS) to resolve a dispute in the financial sector as well. This study is using a normative method. That study emphasized on the authority of the consumer dispute resolution on the financial institutions between BPSK and LAPS and the dispute resolution procedure by BPSK and LAPS-BMPPVI. The study result is showing that BPSK has the authority to resolve the final consumer dispute. that authority has written in the Minister of Industry and Trade Decree of Republic Indonesia No 350/MPP/Kep/12/2001 concerned the duties and authorities implementation of The Consumer Dispute Resolution and the rules of Trade Ministry No 06/M-DAG/PER/2/2017 about the Agency of Consumer Dispute Resolution. The rules related to the credit agreement cases by BPSK are often canceled by the Supreme Court because BPSK is judged as having no authority to resolve a dispute in the agreement. The Alternative Agency of Dispute Resolution authority is showed in the OJK regulation no 1/POJK.07/2014 concerned the Alternative Agency of Dispute Resolution in the financial service sector. LAPS divides the dispute resolution agency of the financial sector is 6 agencies where OJK is as founder and laps have an authority to resolve the consumer dispute resolution on the financial institutions namely BMPPVI (the pawnshop, financing, and venture capital mediation agency of Indonesia). BPSK resolves a dispute through the mediation, conciliation and arbitration ways while LAPS-BMPPVI resolves a dispute through the mediation, adjudication and arbitration.*

*Keywords: BPSK; BMPPVI; LAPS; Financial institutions; Consumer Disputes;*